

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA PEMERINTAHAN DESA DALAM PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DESA (STUDI KASUS DI DESA BATU TERING KECAMATAN MOYO HULU KABUPATEN SUMBAWA NTB)

DEDI SUPRIADI

Ilmu Pemerintahan Universitas Teknologi Sumbawa

dedi.supriadi@uts.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Desa Batu Tering Kecamatan Moyu Hulu Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kebijakan pemerintah desa dalam pembinaan dan memberdayakan masyarakat Desa, adapun hasil penelitian menemukan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemberdayaan dan pembinaan masyarakat di Desa Batu Tering yakni Faktor Internal dan Faktor eksternal. Dalam Faktor Internal dibagi menjadi tiga indikator yakni Struktur Birokrasi, Sumbirdaya dan Kepemimpinan, sedangkan dalam faktor eksternal dilihat dalam dua indikator yakni system social dan agen-agen prentara.

Kata kunci: *pembinaan, Pemberdayaan, Masyarakat*

ABSTRACT

This research was conducted in Batu Tering Village, Moyu Hulu District, Sumbawa Regency, West Nusa Tenggara. The research methods using descriptive qualitative. The purpose of this study is to find out what factors influence the village government in fostering and empowering the village community, while the results of the study found that there are several factors that influence the empowerment and development of the society in Batu Tering Village community, namely Internal Factors and External Factors.

Keywords: *empowerment, development, society*

PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan kekuatan baru bagi penyelenggara pemerintahan di Desa, Undang-Undang Desa memberikan kewenangan yang luas pada pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan di Desa. Pemerintah desa diberikan berbagai macam diantaranya kewenangan lokal desa, kewenangan hak asal usul desa, kewenangan yang diberikan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi dan kewenangan lain yang diberikan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi.

Dalam menjalankan kewenangan lokal desa pemerintah desa diamanatkan melaksanakan empat indikator yakni penyelenggaraan pemerintah desa, Pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam pembinaan dan pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan bertujuan untuk menggerakkan, mengubah cara pandang, dan mewujudkan tujuan kegiatan secara berkelompok akan lebih mudah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 mengenai Desa menyatakan bahwa terdapat kesempatan bagi masyarakat untuk menjalankan aktifitas pemerintahan atau mengurus sendiri urusan rumah tangganya, namun selalu berkaitan dengan persyaratan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keaneka-ragaman daerah. Keberadaan pengangguran hingga angka kemiskinan yang masih besar di Indonesia membuktikan bahwa masyarakat Indonesia saat ini belum terberdayakan dengan baik. Hal ini tentunya tidak mewujudkan terciptanya kesempatan bagi masyarakat untuk menjalankan aktifitas pemerintahan atau mengurus sendiri urusan rumah tangganya.

Pembinaan adalah upaya pendidikan formal maupun non formal yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadiannya seimbang, utuh dan selaras, pengetahuan dan keterampilan sesuai

dengan bakat, kecenderungan/keinginan serta kemampuan-kemampuannya sebagai bekal, untuk selanjutnya atas perkasa sendiri menambah, meningkatkan dan mengembangkan dirinya, sesamanya maupun lingkungannya ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri. Menurut Mathis (2002:112), pembinaan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, proses initerkait dengan berbagai tujuan organisasi, pembinaan dapat dipandang secara sempit maupun luas.hal yang sama dipaparkan oleh Risyanti. (2006:220) menerangkan bahwa Pembinaan adalah totalitas kegiatan yang meliputi perencanaan, pengaturan dan penggunaan pegawai sehingga menjadi pegawai yang mampu mengemban tugas menurut bidangnya masing-masing, agar dapat mencapai prestasi kerja yang efektif dan efisien. Pembinaan dapat juga diartikan sebagai suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan lebih baik.

Sedangkan pemberdayaan adalah upaya pemberian daya pada pihak yang tidak berdaya, menurut Ketaren (2008: 178-183) Pemberdayaan adalah sebuah "proses menjadi", bukan sebuah "proses instan". Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu: Tahap pertama Penyadaran, pada tahap penyadaran ini, target yang hendak diberdayakan diberi pencerahan dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai "sesuatu", prinsip dasarnya adalah membuat target mengerti bahwa mereka perlu (membangun "demand") diberdayakan, dan proses pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri mereka (bukan dari orang luar). Setelah menyadari, tahap kedua adalah Pengkapasitasan, atau memampukan (enabling) untuk diberi daya atau kuasa, artinya memberikan kapasitas kepada individu atau kelompok manusia supaya mereka nantinya mampu menerima daya atau kekuasaan yang akan diberikan. Tahap ketiga adalah Pemberian Daya itu sendiri, pada tahap ini, kepada target diberikan daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang, namun pemberian ini harus sesuai dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki mereka.

Dalam melakukan sebuah tindakan-tindakan tertentu, pada umumnya terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan sekaligus juga kegagalan suatu pemberdayaan. Menurut KBBI, faktor-faktor dapat dikatakan sebagai: "Hal (keadaan, peristiwa) yang memberikan pengaruh terhadap terjadinya sesuatu. Hal ini juga terjadi pada kegiatan pemberdayaan masyarakat." Selanjutnya menurut Suharto (dalam Hatu, 2010:103) menjelaskan bahwa dimensi-dimensi yang dapat dijadikan indikator pemberdayaan masyarakat dalam suatu negara disesuaikan dengan program pembangunan yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat

Dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, terdapat setidaknya dua faktor yang memberikan pengaruh yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Menurut Wijaja (2003: 44) faktor pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari pendukung dan penghambat. Terkait dengan faktor pendukung dibagi menjadi dua yaitu kekuatan program dan kekuatan dari luar. Kekuatan program dapat dikatakan sebagai kekuatan untuk memberikan dukungan terhadap program. Sedangkan faktor dari luar yaitu faktor yang dapat dimanfaatkan program. Sedangkan faktor penghambat dari dalam yaitu kelemahan dalam program dan faktor penghambat dari luar yaitu berupa tantangan atau ancaman.

Selain itu, Rosmedi (2006:44) juga mengatakan bahwa dalam proses pemberdayan masyarakat terdapat beberapa faktor yang bisa menyebabkan kesuksesan dan kegagalan pembangunan masyarakat. Faktor tersebut dibagi menjadi dua bagian yaitu internal dan eksternal. Berikut adalah penjelasannya:

a. Faktor Internal

Faktor ini merupakan faktor dari dalam lingkungan atau unit yang kemudian memerikan pengaruh dalam program pembangunan masyarakat. Faktor ini dapat dijabarkan sebagai hal yang meliputi empat hal, yakni: sejarah komunitas, berkaitan dengan struktur dan kapasitas organisasi, terkait dengan sumberdaya yang dimiliki komunitas, dan berkaitan dengan kepemimpinan dalam komunitas itu sendiri.

b. Faktor Eksternal

Sedangkan untuk faktor eksternal dikatakan sebagai faktor yang berasal non unit yang kemudian memberikan berpengaruh terhadap pembangunan masyarakat setempat. Faktor ini kemudian memberikan dua aspek yang mempengaruhi pemberdayaan yaitu menyangkut sistem sosial politik makro dimana komunitas berada, dan berkaitan dengan ada atau tidaknya agen-agen perantara yang dapat menjadi penghubung antara komunitas dengan dunia atau pihak-pihak luar.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah apa saja factor-faktor yang mempengaruhi pemerintah desa Batu Tering dalam pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa?

Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pemerintah desa dalam pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.

METODE PENELITIAN

Menurut Kirk dan Miller dalam Meloeng (2000:3) penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental bergantung pengamatan pada manusia di kawasannya sendiri serta berhubungan dengan orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.

Dilihat dari objek dan metode analisis yang digunakan, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang berfokus pada faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah desa dalam pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa. Informan adalah orang yang dipercaya menjadi informasi oleh peneliti yang akan memberikan informasi secara detail untuk melengkapi data yang ada pada peneliti. Sedangkan teknik pengumpulan data pada penelitian ini dibagi menjadi tiga tahap yakni observasi, wawancara mendalam dengan informan yang diyakini memiliki kompetensi atas masalah yang diteliti, sedangkan yang ke tiga adalah studi dokumentasi dimana data yang didapat secara tidak langsung, baik berupa dokumen, arsip, buku-buku, artikel dan beberapa sumber dari internet sebagai pendukung penelitian ini. Sedangkan teknik analisis data menggunakan metode interaktif Miles, analisis data pada penelitian ini terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi". Data yang ditemukan diuji kebenarannya dengan menganalisis dan mengklarifikasinya dengan model implementasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Yang Mempengaruhi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Batu Tering

1. Faktor Internal

a. Struktur dan kapasitas organisasi

Dalam proses pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa Batu Tering, struktur dan kapasitas organisasi sangat penting. Struktur organisasi mengacu pada susunan hierarki dan tugas yang ada dalam organisasi yang bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan. Pemerintah Desa jelas memiliki tugas dan wewenang dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Dari hasil penelitian yang peneliti dapatkan dan juga beberapa wawancara yang dilakukan, bahwa Pemerintah Desa melakukan beberapa mekanisme dalam proses perencanaan terhadap pembinaan dan pemberdayaan.

Organisasi dalam proses pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa Batu Tering dapat terdiri dari berbagai entitas seperti lembaga pemerintah setempat, organisasi non-pemerintah, kelompok masyarakat, dan individu yang berperan serta dalam mendukung kegiatan. Berikut ini jumlah dan tingkat pendidikan perangkat desa dan anggota BPD pada Desa Batu Tering :

Tabel 1. Jumlah dan Tingkat Pendidikan Perangkat Desa (2020)

No	Pemerintahan Desa	Jumlah (orang)	Kualifikasi Pendidikan			Jenis Kelamin	
			SMP	SMA	D1-S1	Perempuan	Laki-laki
1.	Kepala Desa	1	-	-	1	-	1
2.	Sekretaris Desa	1	-	1	-	-	1
3.	Kepala Seksi	3	-	3	-	-	3
4.	Kepala Urusan	3	-	3	-	1	2
5.	Kepala Dusun	3	-	4	-	2	1
6.	Ketua RW	4	4	-	-	-	4
7.	Ketua RT	15	15	-	-	-	15
8.	BPD	5	1	2	2	1	4

Sumber Data : RPJMDes Batu Tering Tahun 2020-2026

Permasalahan dan tantangan pembangunan di desa yang semakin mengarah pada multidimensi secara pengelolaan yang melibatkan segenap aparat pemerintahan desa. Komponen atau aparat dimaksud hendaknya memiliki kemampuan yang optimal dalam pelaksanaan tugasnya. Berdasarkan tingkat pendidikan perangkat desa di atas, dapat diketahui bahwa Kepala Desa Batu Tering kepala desa berpendidikan terakhir S1, Sekretaris Desa, Kepala seksi, kepala urusan dan kepala dusun berpendidikan terakhir SMA, kemudian Ketua RT dan RW berpendidikan terakhir SMP, serta BPD ada yang berpendidikan terakhir SMP, SMA, Dan S1. Namun, tingkat pendidikan hanya merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja seseorang dalam pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Meskipun pendidikan formal penting dalam memberikan pengetahuan dan keterampilan yang relevan, faktor seperti pengalaman, kepemimpinan, komunikasi, dan pemahaman akan kebutuhan masyarakat juga memainkan peran penting dalam kinerja seseorang dalam posisi tersebut. Dalam hal ini, Pemerintah Desa Batu Tering

di anggap kompeten dalam menjalankan tugas di bidangnya masing-masing adalah karena faktor pengalaman, sudah menjabat sejak dari kepala desa sebelumnya.

Tingkat pendidikan yang lebih tinggi mungkin memberikan pemahaman yang lebih luas tentang isu-isu sosial, ekonomi, dan politik, serta kemampuan analisis yang lebih baik. Ini dapat membantu individu dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan pendekatan yang lebih efektif dan bertanggung jawab. Namun, ini bukan jaminan bahwa seseorang dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memiliki kinerja yang lebih baik daripada mereka yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah. Selain pendidikan, faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja mereka dalam pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa termasuk keahlian manajemen, kemampuan membangun hubungan, sensitivitas sosial, dedikasi, dan ketersediaan sumber daya yang memadai. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara holistik berbagai aspek yang mempengaruhi kinerja individu dalam peran pemerintahan desa tersebut.

Selain itu, pemerintah pusat juga telah melakukan peningkatan kapasitas terhadap pemerintah desa pada tahun 2023. Tindakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa agar mereka dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan era digitalisasi yang terus berjalan. Era digitalisasi telah menawarkan peluang dan tantangan baru bagi pemerintah desa, dan oleh karena itu, peningkatan kapasitas ini menjadi sangat penting.

Dalam menghadapi era digitalisasi, pemerintah memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil selalu disesuaikan dengan kondisi saat ini. Dalam konteks ini, pemerintah mencoba untuk menyediakan sumber daya dan pelatihan yang diperlukan agar pemerintah desa dapat mengikuti perkembangan teknologi. Hal ini bertujuan untuk mendukung kegiatan pemerintah desa dan membantu mereka mencapai setiap target yang telah ditetapkan.

Mengingat bahwa pemerintah desa memiliki peran yang sangat vital dalam pengelolaan pemerintahan di tingkat lokal, langkah-langkah ini merupakan upaya yang penting untuk memastikan kualitas pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat desa. Peningkatan kapasitas pemerintah desa akan memberikan mereka keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengelola dan memajukan desa mereka menuju kemajuan sosial-ekonomi yang berkelanjutan.

b. Sumber daya yang dimiliki komunitas

Sebagai faktor internal yang mempengaruhi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Batu Tering, komunitas memiliki beberapa sumber daya yang dapat dimanfaatkan.

Pertama, sumber daya manusia. Komunitas Desa Batu Tering memiliki anggota yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang beragam. Sumber daya manusia ini dapat digunakan untuk mengatasi berbagai masalah dan memajukan pembangunan di desa. Misalnya, mereka dapat dilibatkan dalam program pelatihan keterampilan, pengembangan usaha mikro, atau kegiatan sosial lainnya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. Potensi Sumber Daya Manusia

No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah laki-laki	778 orang
2.	Jumlah perempuan	794 orang
3.	Jumlah total	1.572 orang
4.	Jumlah Kepala Keluarga	566 KK
5.	Kepadatan penduduk	150,53 KM

Sumber Data : Profil Desa Batu Tering

Kedua, sumber daya anggaran. Sumber daya anggaran desa merujuk pada semua pendapatan yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah desa. Sumber daya anggaran desa dapat berasal dari beberapa sumber, antara lain:

1. Bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN): Pemerintah pusat dapat mengalokasikan dana untuk mendukung pembangunan desa melalui program-program pemerintah, seperti Dana Alokasi Umum atau Dana Desa.
2. Bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD): Pemerintah daerah atau kabupaten juga dapat mengalokasikan sebagian anggaran mereka untuk pembangunan desa dalam APBD. Dana ini sering kali diberikan dalam bentuk Dana Alokasi Khusus atau Dana Desa.
3. Pendapatan Asli Desa (PAD): Desa juga memiliki sumber pendapatan sendiri yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah desa, seperti pajak, retribusi, dan hasil usaha desa.
4. Dana Desa: Dana Desa merupakan program dari pemerintah pusat yang memberikan alokasi dana kepada setiap desa di Indonesia. Dana ini diperuntukkan untuk mendukung pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan.

5. Sumber-sumber lainnya: Desa juga dapat mengakses sumber daya anggaran dari sumber lain seperti bantuan dan kerjasama dengan pihak ketiga, donasi masyarakat, dan sumber pendapatan lain yang sah.

Pemerintah desa bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya anggaran desa dengan transparansi dan akuntabilitas yang baik agar dana-dana tersebut dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk pembangunan desa serta kesejahteraan masyarakat di dalamnya. Anggaran untuk pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dapat di lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Batu Tering Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Keluaran/output		Anggaran	Sumber Dana
		Volume	Satuan		
1.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	1	Tahun		
	a. Sub bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. -Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa.			8.347.700,00	DDS
	b. Sub bidang kebudayaan dan keagamaan -Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (HUT RI, Raya keagamaan, dll). -Pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik desa (dipilih).			43.881.000,00	PBH
	c. Sub bidang kepemudaan dan olahraga -pembinaan karang taruna atau klub kepemudaan/ olahraga tingkat desa.			3.502.000,00	DDS
	d. Sub bidang kelembagaan masyarakat. -Pembinaan PKK			21.720.000,00	DDS
2.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1	Tahun		
	a. Sub bidang pertanian dan peternakan -Peningkatan produksi peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang). -Penguatan ketahanan pangan tingkat desa (Lumbung desa, dll).			197.965.000,00	DDS
	b. Sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa - Peningkatan kapasitas kepala desa -Peningkatan kapasitas aparatur desa.			10.876.000,00	ADD
	Jumlah Belanja			286.291.700,00	

Sumber Data : APBDes Batu Tering Tahun Anggaran 2022

Dalam tabel di atas, disebutkan bahwa anggaran yang digunakan untuk pembinaan masyarakat adalah sebesar Rp. 77.450.700,00, sementara anggaran untuk pemberdayaan masyarakat adalah sebesar Rp. 208.841.700,00. Angka-angka ini mencerminkan alokasi dana yang telah ditentukan untuk dua kegiatan tersebut.

Pembinaan masyarakat adalah suatu proses yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Anggaran sebesar Rp. 77.450.700 yang dialokasikan untuk pembinaan masyarakat menunjukkan bahwa pemerintah atau organisasi terkait menganggap ini sebagai prioritas kegiatan yang penting. Dana ini akan digunakan untuk mendukung berbagai program dan kegiatan yang melibatkan masyarakat, seperti bidang ketertiban umum, bidang kepemudaan dan olahraga, bidang kebudayaan dan keagamaan, dan bidang kelembagaan masyarakat.

Ketiga, sumber daya infrastruktur, yang merujuk pada semua fasilitas fisik yang ada di dalam suatu desa yang mendukung aktivitas dan kebutuhan masyarakat desa. Ini termasuk jaringan transportasi, air bersih, sanitasi, sistem penyediaan listrik, layanan telekomunikasi, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, dan fasilitas umum lainnya. Desa Batu Tering memiliki infrastruktur yang cukup memadai seperti penyediaan air bersih penting bagi kesejahteraan masyarakat desa dan dapat mencakup sumur, saluran air, atau sungai yang memberikan pasokan air yang aman dan layak konsumsi, tempat pembuangan sampah yang tepat, dan pengelolaan limbah yang efisien, Sistem penyediaan listrik di desa sangat penting untuk memfasilitasi penerangan, penggunaan peralatan elektronik, dan pengembangan usaha mikro di desa, Layanan telekomunikasi seperti internet juga dapat membantu desa terhubung dengan dunia luar dan meningkatkan akses informasi, fasilitas pendidikan seperti sekolah dan perpustakaan desa, fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan posyandu sehingga masyarakat desa dapat mengakses perawatan kesehatan dasar dengan mudah, serta Jaringan transportasi di desa mencakup jembatan dan jalan yang menghubungkan desa dengan kota atau wilayah sekitarnya. Akan tetapi, infrastruktur jalan yang menghubungkan antara Desa Batu Tering dengan Desa Sebasang mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan, jalan tersebut rusak parah selama bertahun-tahun yang menyebabkan pengunjung Desa mengalami kesulitan ketika melintasi jalan tersebut. Sehingga perlu adanya perhatian dari Pemerintah Daerah akan hal tersebut.

Tabel 4. Status, Panjang, dan Kondisi Jalan (2020)

No	Status Jalan	Panjang (m)		Jumlah (m)
		Baik	Rusak	
1.	Jalan Kabupaten	0	6.000	6.000
2.	Jalan Lingkungan	7.000	200	7.200

Sumber Data : RPJMDes Batu Tering Tahun 2020-2026

Dalam mengelola sumber daya yang dimiliki, komunitas Desa Batu Tering dapat melibatkan partisipasi aktif dari anggota masyarakat, melakukan perencanaan yang terpadu, serta menjaga keterbukaan dan inklusivitas. Dengan demikian, sumber daya internal ini dapat dioptimalkan dan mendukung pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Batu Tering.

Meskipun demikian, Desa Batu Tering memiliki potensi yang besar dalam bidang pariwisata. Dengan memperbaiki infrastruktur jalan dan mempromosikan desa ini sebagai tujuan wisata yang menarik, diharapkan jumlah kunjungan wisatawan dapat meningkat dan memberikan dampak positif bagi perkembangan desa secara ekonomi. Peran pemerintah dan kolaborasi dengan pihak terkait diharapkan dapat membantu mengatasi hambatan-hambatan ini dan mendorong pertumbuhan pariwisata di Desa Batu Tering.

c. Kepemimpinan dalam komunitas

Dalam konteks komunitas Desa Batu Tering, kepemimpinan memiliki peran yang sangat penting sebagai faktor internal yang mempengaruhi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Kepemimpinan yang baik dapat menciptakan stabilitas, koordinasi, dan harmoni di antara anggota komunitas, serta mendorong partisipasi aktif mereka.

Kepemimpinan dalam komunitas dapat berarti kepemimpinan formal, seperti yang dimiliki oleh kepala desa atau pemimpin lokal lainnya, maupun kepemimpinan informal yang muncul dari individu yang dihormati dan diakui oleh anggota komunitas. Dalam keduanya, peran utama pemimpin adalah untuk menghubungkan, mengkoordinasikan, dan menggerakkan masyarakat dalam mencapai tujuan bersama.

Pemimpin komunitas yang efektif harus memiliki kualitas kepemimpinan yang inklusif, empatik, dan berorientasi pada pemberdayaan. Mereka harus mampu mendengarkan dan memahami kebutuhan serta aspirasi anggota komunitas, serta mengkoordinasikan upaya melibatkan semua pihak secara aktif. Kepemimpinan yang baik juga harus mampu membangun kerjasama yang kuat antara anggota komunitas, menciptakan lingkungan yang inklusif, dan mendorong partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan.

Dengan adanya kepemimpinan yang baik, komunitas Desa Batu Tering dapat mengalami kemajuan yang signifikan dalam pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Pemimpin yang efektif akan menjadi teladan bagi anggota komunitas, memotivasi mereka untuk berpartisipasi aktif, mengkoordinasikan sumber daya yang ada, dan mengarahkan upaya menuju pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan komunitas secara keseluruhan.

Pertama, karakteristik kepemimpinan otoriter telah usang dan tidak lagi relevan. Jenis kepemimpinan ini ditandai dengan pemimpin yang memberi perintah tanpa melibatkan anggota tim atau masyarakat dalam pengambilan keputusan. Ini mungkin efisien dalam beberapa situasi yang membutuhkan tindakan cepat, tetapi kadang-kadang dapat menyebabkan kurangnya partisipasi dan keterlibatan anggota tim serta kurangnya kreativitas.

Kedua, karakteristik kepemimpinan karismatik adalah jenis kepemimpinan di mana pemimpin memiliki daya tarik dan pengaruh yang kuat terhadap anggota tim atau masyarakat. Pemimpin karismatik dapat memotivasi, menginspirasi, dan membimbing orang lain menuju tujuan bersama. Pemimpin ini seringkali memiliki kepribadian yang menarik dan kemampuan komunikasi yang baik, yang membuat mereka menjadi sosok yang disegani dan diikuti.

Namun, karakteristik kepemimpinan yang paling diterapkan oleh Kepala Desa Batu Tering adalah kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis melibatkan proses musyawarah dan partisipasi kolektif dalam pengambilan keputusan. Pemimpin demokratis tidak hanya memberi perintah secara langsung, tetapi mendengarkan pendapat dan masukan dari anggota tim atau masyarakat sebelum membuat keputusan akhir.

Meskipun proses pengambilan keputusan dalam kepemimpinan demokratis dapat memakan waktu yang lebih lama dan melibatkan banyak pihak, pendekatan ini memiliki beberapa keunggulan. Pertama, melibatkan orang lain dalam pengambilan keputusan dapat membawa sudut pandang yang beragam dan solusi yang lebih komprehensif. Kedua, pemimpin demokratis mampu membangun hubungan yang kuat dengan anggota tim atau masyarakat, karena mereka merasa didengar dan dihargai.

Namun, perlu diperhatikan bahwa kepemimpinan demokratis juga memiliki keterbatasan. Proses musyawarah dapat memperlambat pengambilan keputusan dan kadang-kadang membuahkan hasil yang tidak memuaskan semua pihak. Selain itu, terdapat situasi darurat di mana kepemimpinan otoriter atau kepemimpinan karismatik mungkin lebih cocok.

Dalam konteks yang disampaikan dalam kalimat tersebut, penting bagi seorang pemimpin atau kepala desa untuk menerapkan kepemimpinan demokratis. Hal ini memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam

pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Meskipun prosesnya dapat lebih lambat, namun dampaknya bisa lebih positif dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Dalam banyak kasus, kepala desa berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan adalah pendekatan yang bisa memastikan keputusan tersebut mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat secara luas. Lebih jauh lagi, melibatkan masyarakat bisa memberdayakan mereka untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa dan memberikan rasa memiliki terhadap keputusan yang diambil.

Selain itu, melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan juga dapat memelihara hubungan yang harmonis antara kepala desa dan warganya. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan akan menciptakan dialog yang terbuka dan transparan antara pemimpin dan warga. Ini menciptakan kepercayaan, meningkatkan komunikasi, dan mengurangi potensi konflik yang mungkin timbul.

Dalam konteks sosial dan politik, kepala desa yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan ini juga dapat mendorong partisipasi publik yang lebih luas dan memberikan kesempatan bagi semua anggota masyarakat, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi, untuk menyuarakan pendapat mereka. Melalui partisipasi ini, masyarakat dapat merasa memiliki dan terlibat dalam penyusunan kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka.

Secara keseluruhan, pendekatan kepala desa yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan adalah langkah yang positif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ini mencerminkan prinsip demokrasi yang mempromosikan partisipasi publik dan masih memprioritaskan kesejahteraan dan harapan masyarakat di atas kepentingan pribadi pemimpin. Dalam jangka panjang, pendekatan ini mendorong keterlibatan aktif masyarakat, memperkuat ikatan sosial, dan mewujudkan perkembangan yang berkelanjutan di tingkat desa.

2. Faktor Eksternal

a. Sistem Sosial Politik Makro

Sistem sosial politik makro merupakan faktor eksternal yang sangat penting dalam pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa Batu Tering. Sistem tersebut mencakup kerangka hukum, kebijakan publik, dan struktur sosial politik di tingkat nasional atau regional yang berpengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat desa. Melalui sistem sosial politik makro yang baik, masyarakat Desa Batu Tering dapat memperoleh berbagai kebijakan dan bantuan yang mendukung pengembangan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sosial lainnya.

Selain itu, sistem ini juga berperan dalam memberikan akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat Desa Batu Tering. Kebijakan ekonomi dan peraturan yang diterapkan oleh pemerintah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Jika sistem sosial politik makro yang ada menyediakan peluang dan insentif untuk mengembangkan sektor ekonomi lokal, maka masyarakat Desa Batu Tering akan memiliki kesempatan yang lebih besar dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi kemiskinan.

Dengan demikian, penting bagi masyarakat Desa Batu Tering untuk menjalin kerja sama dengan pemerintah dan memanfaatkan sistem sosial politik makro yang ada secara optimal. Mereka perlu berpartisipasi aktif dalam penyusunan kebijakan, memanfaatkan program pemerintah, dan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Dengan adanya dukungan dari sistem sosial politik makro, maka masyarakat Desa Batu Tering dapat mengatasi berbagai tantangan dan mempercepat pembangunan serta pemberdayaan masyarakat setempat.

Pemerintah Desa di Desa Batu Tering memandang situasi tersebut sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang. Mereka yakin bahwa dengan penyesuaian yang tepat, mereka dapat mengatasi setiap hambatan yang muncul. Ini menunjukkan sikap yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di tingkat desa.

Dalam konteks ini, pemerintah desa menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat. Mereka berusaha memberikan sumber daya dan keterampilan kepada penduduk desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan mandiri. Penulis berpendapat bahwa upaya ini tidaklah sulit atau mempengaruhi mereka dengan cara yang negatif.

Secara keseluruhan, pernyataan di atas mencerminkan sikap optimis dan komitmen Pemerintah Desa Batu Tering dalam membangun dan memberdayakan masyarakat setempat. Mereka melihat tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, dan terus berusaha menyesuaikan diri dengan situasi yang ada.

Dalam hal ini, pendekatan ke masyarakat menunjukkan upaya untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan mereka dalam mengambil keputusan politik yang signifikan. Hal ini tidak hanya memungkinkan masyarakat untuk merasa terlibat dalam proses tersebut, tetapi juga mencegah terjadinya ketidakpuasan atau ketidakseimbangan kepentingan.

Dapat disimpulkan bahwa dalam konteks sosial politik makro, pendekatan seperti ini dapat berperan sebagai sarana untuk mencapai tujuan bersama dan menjaga stabilitas dalam sebuah komunitas. Meskipun terdapat perbedaan

pandangan di antara masyarakat, penggabungan dan fokus pada satu tujuan yang sama membantu mencegah pecahnya polarisasi.

b. Agen-agen perantara

Agen-agen perantara merupakan faktor eksternal yang memainkan peran penting dalam pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Mereka bertindak sebagai penghubung antara pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat. Melalui perannya, agen-agen perantara dapat menyampaikan informasi, program, dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Mereka juga berperan dalam membantu masyarakat memahami dan mengakses berbagai layanan yang disediakan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Selain itu, agen-agen perantara juga dapat menggalang dukungan dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan diri. Mereka memfasilitasi dialog dan kerjasama antara masyarakat dengan berbagai pihak terkait, memperkuat hubungan sosial, dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi perubahan sosial dan ekonomi.

Pentingnya peran agen-agen perantara tidak hanya terbatas pada pengiriman informasi dan program, tetapi juga dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Mereka mendampingi dan memberikan bimbingan kepada masyarakat dalam mengembangkan potensi diri, meningkatkan keterampilan, dan mengakses sumber daya yang dibutuhkan. Dalam hal ini, agen-agen perantara dapat memberikan pelatihan, pendampingan, dan pengarahan kepada masyarakat dalam berbagai bidang, seperti kewirausahaan, pertanian, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Selain itu, agen-agen perantara juga berperan dalam mempertemukan masyarakat dengan peluang-peluang ekonomi dan sosial, termasuk peluang kerja dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Secara keseluruhan, agen-agen perantara sebagai faktor eksternal dalam pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sangat penting. Mereka berkontribusi dalam meningkatkan informasi, keterampilan, partisipasi, dan pilihan yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya dukungan dan kerjasama dari agen-agen perantara, masyarakat dapat lebih aktif dan berpengaruh dalam mengembangkan potensi diri serta membangun masyarakat yang lebih kuat dan berkelanjutan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa hambatan yang di lalui oleh Pemerintah Desa Batu Tering dalam pembinaan dan Pemberdayaan masyarakat desa diantaranya infrastruktur jalan menuju Desa Batu Tering yang masih rusak sehingga pengunjung maupun wisatawan susah mengaksesnya, dan juga banyak potensi desa yang bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat dan anggaran yang belum memadai.

Saran

Pemberdayaan masyarakat desa sangat penting khususnya pemahaman dan usaha dibidang wisata untuk memajukan desa wisata dan menarik wisatawan datang ke desa.

DAFTAR PUSTAKA

- A.W. Widjaja. (2003), Otonomi Desa. Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada.
Ketaren, S. (2008). Pengantar Teknologi Minyak dan Lemak Pangan. Edisi pertama. Jakarta: Penerbit UI- Press.
Mathis, R. (2002). Manajemen Sumber Daya Manusia. Salemba Empat. Jakarta:
Moleong, L.J. (2010). Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda Karya
Rosmedi dan Riza Risyanti. (2006). Pemberdayaan Masyarakat. Sumedang: Alqaprit Jatinegoro
Risyanti. (2006). Pemberdayaan Masyarakat. Sumedang: Alqaprit Jatinegoro
Suharto, Edi. (2005). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Surabaya:PT. Refika Aditama.
Undang-Undang No.06 Tahun 2014 Tentang Desa
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 mengenai Desa